

ISU Sepekan

BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL

Minggu ke 4 Bulan April 2021 (tanggal 16 s.d. 22 April)

TANTANGAN KTT ASEAN

Rizki Roza

Peneliti Bidang Hubungan Internasional

rizki.roza@dpr.go.id



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

ISU ATAU PERMASALAHAN

Sejak junta militer menggulingkan pemerintahan sah pada Februari lalu, Myanmar terus bergejolak. Tindakan brutal junta militer mengakibatkan hampir 250.000 orang di Myanmar mengungsi. Tindak kekerasan terus meningkat hampir setiap hari. Bahkan junta telah mengerahkan serangan udara dan darat di sejumlah daerah sejak awal April. Salah satu laporan mencatat bahwa hingga saat ini terdapat 738 orang tewas dan sekitar 3.300 lainnya ditahan. Sekitar 70 jurnalis ditangkap, 38 orang diantaranya masih dalam penahanan.

Kondisi ini telah melahirkan seruan dari berbagai pihak agar komunitas internasional bergerak cepat untuk meredakan krisis. Negara-negara barat yang menjatuhkan sanksi terhadap Jenderal Min Aung dan sejumlah petinggi Tatmadaw lainnya yang terlibat kudeta menyadari bahwa sanksi hanya akan memberi dampak terbatas bagi penyelesaian persoalan. Karena itu, pemerintah negara-negara Eropa, Amerika Utara, dan Asia Timur menghimbau mitra mereka di Asia Tenggara untuk memimpin upaya mengatasi krisis. Bagi ASEAN, situasi Myanmar dapat menjadi ancaman serius bagi stabilitas kawasan, antara lain adanya resiko arus pengungsi ataupun kemungkinan pecahnya perang saudara di Myanmar. Merespons keadaan dan dorongan masyarakat internasional, para pemimpin ASEAN sepakat untuk menggelar pertemuan di Jakarta, 24 April ini untuk membicarakan persoalan Myanmar dan bersama-sama berupaya mengakhiri krisis itu. Pertemuan tersebut direncanakan akan dihadiri juga oleh pemimpin junta, Jenderal Min Aung Hlaing.

Rencana pertemuan ini menjadi sorotan masyarakat internasional, terutama terkait kehadiran pemimpin junta. Rencana ini mendapat protes keras dari kalangan aktivis prodemokrasi Myanmar dan menuntut untuk tidak melibatkan militer Myanmar dalam upaya penyelesaian krisis. Human Rights Watch juga berpandangan bahwa tidak seharusnya Jenderal Min diterima dan diberi kesempatan menyampaikan pandangannya di hadapan ASEAN. Sejumlah LSM di Indonesia juga menyatakan penolakan. Banyak pihak juga meragukan pertemuan ini dapat menghasilkan sesuatu mengingat prinsip non-intervensi ASEAN. Selain rencana ASEAN menghadirkan pemimpin kudeta mendapat kritik berbagai pihak, internal ASEAN juga masih menghadapi persoalan dalam mencapai kesamaan sikap. Indonesia, Malaysia, Singapura dan Filipina masih berbeda pandangan dengan negara anggota lainnya seperti Laos, Thailand, dan Vietnam. Sikap anggota ASEAN terhadap persoalan Myanmar masih terbelah.

Sebelum mampu menawarkan solusi yang dapat diterima semua pihak di Myanmar, pertemuan ASEAN ini setidaknya harus menghadapi dua tantangan penting yaitu untuk meyakinkan banyak pihak bahwa kehadiran pemimpin junta bukan bentuk keberpihakan dan memberi legitimasi pada junta; dan tantangan untuk mencapai kesamaan sikap di internal ASEAN.

SUMBER

www.kompas.com, 21 April 2021; www.bbc.com, 20 April 2021; fokus.tempo.co, 20 April 2021; www.cnnindonesia.com, 20 April 2021.